

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Buku

A.P. Parlindungan. (2009). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Adolf. H. (1991). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 180-201.

Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Program Pascasarjana FH UI. hlm. 7.

Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 276.

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 118.
- Arba, H.M. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 84-85.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Eknomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 321.
- Badruzaman, M.D. (1996). *KUH Perdata Buku III*. Bandung: Alumni. hlm. 89.
- Basah, S. (1992). *Perlindungan hukum terhadap sikap-tindak administrasi negara*. Penerbit Alumni. hlm. 11.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 112.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. hlm. 85.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. hlm. 270.
- Hakim, L. (2014). *Asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Setara Press. hlm. 86.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2011). *Teori Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M.Y. (1986). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni. hlm. 67.
- Harahap, M.Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. hlm. 66.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. hlm. 28.
- Huda, N. (2015). *Negara hukum, demokrasi, dan judicial review*. UII Press. hlm. 67.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 48.
- Kansil, C.S.T. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 102
- Klaus, K. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.

- M. A. Moegni Djojodirjo. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 102.
- Manan, B. (2009). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press. Hlm. 211.
- Marbun, S. F. (2018). *Hukum administrasi negara 1*. FH UII Press. hlm. 226.
- Martin, E. A. (2002). *A dictionary of law*. Oxford University Press. hlm. 477.
- Marzuki, M. L. (2006). *Berjalan-jalan di ranah hukum*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. hlm. 112.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 240.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 1.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum*. Liberty. hlm. 134.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum*. Liberty. hlm. 126.
- Nader & Todd. (1978). *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press. hlm. 14-15.
- Nasution, A. B. (1988). *Bantuan hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Perangin, E. (1994) *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Adat Praktisi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 229.
- Pratiwi, C.S., Purnamawati, S.A., Fauzi, Purbawati, C.Y. (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). hlm. 15.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata*. Mandar Maju. hlm. 7.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum* (Cet. 4). PT Citra Aditya Bakti. hlm. 53.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Kompas. hlm. 91.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada. hlm. 335-337.
- Saleh, K.W. (1977). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 20.
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 112.

- Santoso, U. (2017). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana.
- Setiawan, R. (1977). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta. hlm. 17.
- Setiono. (2004). *Supremasi hukum*. UNS Press. hlm. 3.
- Smith, R. K., dkk. (2009). *Hukum HAM*. Pusham UII. hlm. 12.
- Sumardjono, M. S. W. (2008) *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas. hlm. 112-114.
- Sutedi, A. (2018). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sidang Grafika. hlm. 9.
- Subekti. (2002). *Hukum perjanjian*. Intermasa. hlm. 45.
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa. hlm. 135.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik*. Mandar Maju. hlm. 103–120.
- Supriadi. (2007). *Hukum agrarian*. Sinar Grafika. hlm. 53-54.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law*. Cambridge University Press. hlm. 122.
- Veger. (1993). *Realitas sosial* (Cet. 1). Gramedia Pustaka Utama. hlm. 211.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Cipta Reka. hlm. 12.

Karya Ilmiah

- Almadi, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol non tunai. *Jurnal Privat Law*, 9(1), hlm. 222.
- Andriyan, D.N. (2021). Pencatatan Sengketa sebagai Instrumen Pencegahan Peralihan Hak. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 18(4). hlm. 527.
- Asrun, A.M. (2016). Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>
- Baurch, M.G. (2013). Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Legislasi terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang. *Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Bustamin, A. (2012). Kedudukan Hak Menguasai Negara atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

- Budiono, H. (2015). Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 40(3). hlm. 201.
- Cahyono, T.A., & Harianto, S. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Korban Penggusuran Bangunan di Atas Tanah Pemerintah Kota Surabaya (Studi pada Penghuni Rusunawa Keputih). *Jurnal Paradigma*, 9(1). hlm. 15.
- Fauzan, M.A., & Rohman, F.N. (2020). Problematika Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). *Jurnal Widy Pranata Hukum*. 2(1). hlm. 22.
- Febriansyah, R., Kurniawan, Z. A., Syahladin, F. R., Larasati, G. A., & Surahmad, S. (2024). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi terhadap Penentuan Ganti Rugi. *Media Hukum Indonesia*, 2(4). hlm. 600
- Fendri, A. (2014). Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral dan Etika. *Jurnal Ilmu*. 4(3). hlm. 146.
- Firmansyah, E., Dewi, C.I.D.L., Karo, R.K. (2022). Penerapan Acces Justice melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal Lemhanas RI*, 10 (2). hlm. 73-74.
- Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*. 11(3). <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>
- Hariyono, T. (2021). Mediasi penal sebagai alternatif upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), hlm. 4. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>
- Hartanto, M.F.B., Aziz, D.A.N., Suntoro, A. (2023). Karakteristik Penggusuran di Indonesia: Pentingnya Intervensi HAM Sebelum, Sewaktu, dan Setelah Penanganan. *Jurnal HAM*. 14(2). hlm. 170.
- Jailani, M. (2011). Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *Jurnal Syiar Hukum*. 13(1). hlm. 94.

- Jiwantara, F.A., Dewi, A.P., Supriyadi, A. (2022). Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah di Indonesia dan Netherlands, *Uli' Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7). hlm. 5.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. hlm. 15.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(5).
- Lianadevi, L. (2010). Fungsi Sosial Hak atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Disertas Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Mantili, R. (2019), Ganti Kerugian Imateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 4(2), hlm. 2.
- Masyhoer, R., & Nasir, B. (2024). Kehidupan sosial ekonomi pasca relokasi permukiman bantaran sungai Karang Mumus di Perumahan Bengkuring Raya Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Tahun 2024. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 12(3), hlm. 69.
- Mulyadi, L. (2017). Kewenangan Hakim dalam Menentukan Bentuk Ganti Rugi Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 6(2). hlm. 215.
- Muttaqin, E.B. (2024). Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara. *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*. hlm. 114.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*.
- Pandamdari, E. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Sertifikat Ganda. *Jurnal Yuridika*. 35(2) hlm. 255.
- Purba, H. (2010). Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat: Sengketa Akibat Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law & Governance Journal*. 10(2). hlm. 6.

- Ratnaningrum, D.H. (2020). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dalam Praktik Peradilan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding* 9(1). hlm. 98.
- Rangkuti, S. S. (2014). Perlindungan hukum terhadap korban tindakan pemerintah. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 22(1), hlm. 57.
- Rejekiingsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (Suatu tinjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia). *Jurnal Yustitia*, 5(2).
- Risandy, D.A. & Saibih, J. (2024). Onrechtmatige Overheidsdaad: Menyoal Penerapan Regulasi dalam Praktik Penyelesaiannya di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(4). <https://doi.org/10.54629/jli.v21i4.1489>.
- Sadiawati, D. (2021). Pemulihan Hak Korban Penggusuran dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal HAM*. 11(1). hlm. 58.
- Sitanggang. (2024). Restitutio in integrum in criminal regulation of restitution for the victims of criminal acts. *Journal of Law, Politics and Humanities*, 5(1).
- Sonata, D.L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. 8(1). [10.25041/fiatjustisia.v8no1.283](https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283).
- Suryandari, R.P., Silviana, A. & Marjo. (2016). Penerapan Asas Fungsi Sosial Terkait Kepemilikan Tanah Hak Guna Bangunan oleh PT Bangun Jogja Indah (Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman dengan PT Bangun Jogja Indah). *Diponegoro Law Journal*. 5(3).
- Syah, A. S. R. (2020). Rechtspositie Badan Hukum Privat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Justisi*, 6(1) hlm. 8. <https://doi.org/10.33506/js.v6i1.779>.
- Tim Penyusun. (2024). *Pedoman tugas akhir Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2024*. UPNVJ. hlm. 5.
- Tjoanda, M. (2010). Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi*. 16(4). hlm. 45.

- Wahyuni, R. (2022). Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif HAM. *Jurnal Yuridis*, 9(1), hlm. 37.
- Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateril (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G). *Diponegoro Law Journal*. 6(2).
- Yuniyanti, R. (2008). Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melawan PT. Telekomunikasi Selular). *Skripsi Universitas Indonesia*.

Internet

- Auli, R. C. (2023). *Apa itu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata?* Hukumonline.com. Diakses pada 1 November 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>
- Asshidiqie, J. (t.th.). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Pn-gunungsitoli.go.id. Diakses pada 3 November 2025, dari https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
- BBC Indonesia. (2025). *'Sertifikat ganda' di Bekasi gusur rumah warga – Mengapa BPN terbitkan sertifikat di atas tanah sengketa?* Bbc.news. Diakses pada 25 Oktober 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2yv2dpr4do>
- International Finance Corporation. (2023). *Land acquisition and involuntary resettlement*. Ifc.org. Diakses pada 1 Desember 2025, dari <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2023/handbook-land-acquisition-and-involuntary-resettlement>
- Ombudsman Republik Indonesia. (t.th.). *Tata cara penyampaian laporan/pengaduan pelayanan publik*. Ombudsman.go.id. Diakses pada 16 Desember 2025, dari <https://ombudsman.go.id/pengaduan>

- Segal, S. (t.th.). *The international human right to adequate housing: An economic approach*. The University of Chicago The Law School. Diakses pada 1 Desember 2025, dari <https://cjl.uchicago.edu/print-archive/international-human-right-adequate-housing-economic-approach>
- Tim Hukumonline. (2023). 7 Asas hukum agraria dalam UUPA. Hukumonline.com. Diakses pada 25 November 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-agraria-lt646201e7068e8/?page=1>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *UNDP SES Standard 5: Displacement and resettlement, guidance note*. Ses-toolkit.info.undp.org. Diakses pada 16 Desember 2025, dari https://ses-toolkit.info.undp.org/sites/g/files/zskgke446/files/2023-03/UNDP%20SES%20S5%20Displacement%20and%20Resettlement%20GN_rev_July2022.pdf
- United Nations General Assembly. (2005). *Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law (Resolution 60/147)*. Ohchr.org. Diakses pada 29 Januari 2026, dari https://digitallibrary.un.org/record/563157?v=pdf&utm_
- United Nations Human Rights. (t.th.). *Forced evictions and human rights*. Ohchr.org. Diakses pada 1 Desember 2025, dari <https://www.ohchr.org/en/forced-evictions-and-human-rights>
- Wahyuni, W. (2022). *Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum*. Hukumonline.com. Diakses pada 1 November 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/?page=2>
- Warsono, A. (2025). *Menteri ATR BPN ungkap pengadilan salah gusur lima rumah di Cluster Setia Mekar Bekasi*. Tempo.com. Diakses pada 25 Oktober 2025, dari <https://www.tempo.co/hukum/menteri-atr-bpn-ungkap-pengadilan-salah-gusur-lima-rumah-di-cluster-setia-mekar-bekasi-1204354>

Sumber Lainnya

Widodo, W. A. S. (2025). *Seksi pengendalian dan penanganan sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Wawancara pribadi*. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Bekasi.